

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *GOOD GOVERNANCE* DAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS PADA  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI)**

**RITA FRIYANI\*)**

\*) Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal, Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, untuk membuktikan secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian madalah bahwa desentralisasi Fiskal, Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, good Governance tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.*

*Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas Keuangan*

---

**PENDAHULUAN**

Pergantian pemerintahan di Indonesia dari orde baru ke orde reformasi menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang lebih luas dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional agar mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undangan Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Djalil (2014) menjelaskan bahwa dalam dekade terakhir ini, Indonesia dihadapkan dengan isu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya krisis ekonomi yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara turun. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas.

Seperti yang terjadi di Kota Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi yang diumumkan pada bulan Mei 2014 bahwa Pemkot Jambi mendapatkan

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Batasan dalam hal ini adalah berhubungan dengan masalah aset. Dari empat temuan BPK, total nominal aset yang tidak jelas laporannya mencapai Rp 220,64 Milyar ([www.jambi.tribunnews.com](http://www.jambi.tribunnews.com)). Hal ini sama dengan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 dimana Pemerintah Kota Jambi juga mendapatkan WDP. Pada tahun tersebut dinyatakan total nominal aset yang tidak jelas laporannya mencapai Rp 204,97 milyar. Pencatatan nilai aset yang dinyatakan tidak jelas tersebut dikarenakan pencatatan nilai aset tidak didukung dengan rincian pada Database Manajemen Daerah (DBMD). Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga tidak memutakhirkan pencatatan aset-aset yang dianggap tidak jelas laporannya tersebut sehingga tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tersebut. BPK menilai bahwa tidak terdapat peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Jambi ([www.antarajambi.com](http://www.antarajambi.com)).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Djalil, 2014). Diperlukan kiat dan kebijakan dari pemerintah agar dapat mencapai hal tersebut. Djalil (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal, penerapan *good governance* dan laporan keuangan yang berkualitas merupakan beberapa contoh cara agar dapat mencapai atau meningkatkan akuntabilitas keuangan negara (pusat dan daerah). *Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintahan benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury, 1992 yang dikutip Media Akuntansi 2000 dalam Zeyn, 2011). Apabila pemerintah telah melaksanakan prinsip *good governance*, berarti telah akuntabel pula pengelolaan keuangannya.

Pemerintah dituntut untuk transparan dan akuntabel, terutama dalam mengalokasikan uang negara untuk melaksanakan kegiatan. Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka pemerintah harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Djalil, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang telah berpedoman dengan standar akuntansi pemerintahan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang kemudian diikuti dengan PP No. 24 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Pembentukan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Tanjung, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam

rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
3. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?

## **STUDI PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik (akuntansi pemerintahan) merupakan bidang ilmu yang sedang berkembang sangat pesat saat ini. Tuntunan akuntabilitas dan transparansi atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Tujuan utama akuntansi sektor publik bukan untuk memaksimalkan laba tetapi memberikan layanan publik (*public service*). Mardiasmo (2002) menjelaskan akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas, terutama akuntabilitas keuangan negara (pusat dan daerah).

### **Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta mengharuskan lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar (Rasul, 2003). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas (Widodo, 2001).

### **Desentralisasi Fiskal**

#### **Konsep Desentralisasi Fiskal**

Konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian

rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Saragih, 2003).

### **Unsur-unsur Desentralisasi Fiskal**

Menurut Mulyana dkk (2006), unsur-unsur yang wajib diperhatikan dari desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Pendelegasian atau pendistribusian tanggungjawab pengeluaran (*the assignment of expenditure responsibility*).
2. Pendistribusian sumber pendapatan/ perpajakan (*assignment of tax resources*).
3. Transfer antar tingkat pemerintahan (*inter-governmental fiscal transfer*).
4. Mekanisme pinjaman dan utang (*Subnational deficit, borrowing and debt*).

### **Good Governance**

#### **Pengertian Good Governance**

Zeyn (2011) mengemukakan bahwa *good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (akuntabel) pada publiknya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain (*state, private, sector and society*) (Osborne dan Geadbler, 1992; OECD and *World Bank*, 2000; LAN dan BPKP, 2000 dalam Zeyn, 2011). Praktik *good governance* harus memberi ruang kepada ketiga sektor tersebut untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga terwujud adanya sinergi di antara ketiga sektor tersebut.

Sutedi (2011) menjelaskan arti *good governance* sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi.

#### **Karakteristik Good Governance**

*United Nation Development Programme* (UNDP) mengajukan 9 karakteristik *good governance* sebagai berikut (Mardiasmo, 2006) :

1. *Participation.*
2. *Rule of Law.*
3. *Transparency.*
4. *Responsiveness.*
5. *Consensus Orientation.*
6. *Equity.*
7. *Effectiveness and Efficiency.*
8. *Accountability.*
9. *Strategic Vision.*

#### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas (Tanjung, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan (Zeyn, 2011). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, SAP menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Pemakaian SAP cenderung dilakukan agar dapat memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya sehingga informasi keuangan sebagai bahan bagi pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa dihindarkan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Mardiasmo, 2002).

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### **Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
4. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2010). Subjek penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi. Objek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010). Objek penelitian ini adalah pengaruh desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sekaran (2006) menyatakan bahwa data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Indriantoro dan Supomo (2013) menyatakan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner kepada kepala dinas, sekretaris, kasubbag, kabid, kasi dan staf pada DPKAD Kota Jambi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Perolehan data primer yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner tentang *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan diambil dari kuesioner penelitian dari Zeyn (2011) dengan adanya revisi di beberapa pertanyaan. Sedangkan, kuesioner tentang desentralisasi fiskal diambil dari kuesioner penelitian dari Maryanti (2013) dengan adanya revisi di beberapa pertanyaan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner secara langsung ke DPKAD Kota Jambi. Setiap paket kuesioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat di dalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua berisi pertanyaan yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal, *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi yang terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 2 kepala sub bagian, 8 kepala seksi dan 27 staf yang berjumlah 42 orang.

Peneliti menggunakan *Judgement Sampling* (Pemilihan Sampel Berdasarkan Pertimbangan) dalam menentukan sampel, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013). Peneliti hanya menggunakan staf minimal golongan IIIa, kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala bidang yang menggunakan sistem akuntansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sekretaris dan kepala dinas sebagai sampel, sehingga sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 31 orang

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada lima, yaitu Desentralisasi Fiskal (variabel  $X_1$ ), *Good Governance* (variabel  $X_2$ ), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (variabel  $X_3$ ) sebagai variabel independen serta Akuntabilitas Keuangan (variabel  $Y$ ) sebagai variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil signifikansi uji F pada penelitian ini sebesar 0.005 ( $<0.05$ ) sehingga hipotesis pertama ( $H_a$ ) pada penelitian ini diterima. Diterimanya hipotesis ini juga dikarenakan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $5.594 > 2.96$ ), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi, dituntut untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, menerapkan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan dengan baik.

Akuntabilitas keuangan pemerintah bisa tercapai apabila pemerintah bertekad untuk menerapkan prinsip *good governance*. *Good Governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya (Zeyn, 2011). *Good governance* menghendaki pemerintahan yang dijalankan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintahan benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apabila pemerintah telah menerapkan prinsip *good governance* dengan baik, maka akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu dari prinsip dari *good governance* akan meningkat pula.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan keuangan harus disusun berpedomankan standar akuntansi pemerintahan. Apabila laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka laporan keuangan itu dapat dibuktikan kualitasnya dan telah mewujudkan akuntabilitas keuangan. Jadi, apabila standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan dengan baik, maka dapat telah mewujudkan salah satu tahap dari akuntabilitas keuangan.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.427 < 2.0452$ ) dengan signifikansi sebesar 0.165 ( $P > 0,05$ ). Dengan demikian,  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  serta dapat dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Tujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dilaksanakan karena pemerintah daerah lebih mengetahui apa prioritas kebutuhan dari daerahnya sendiri dibanding pemerintah pusat. Hal ini menjadikan pembiayaan atau pengeluaran dilakukan secara lebih efisien dan lebih akuntabel. Akan tetapi hasil yang ditemukan

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hal ini mungkin dikarenakan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Djalil (2014) juga menjelaskan bahwa wujud dan bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia baru didistribusikan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer ke daerah untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Sementara desentralisasi fiskal untuk sisi penerimaan belum diterapkan secara nyata dimana pemerintah pusat masih menguasai basis pajak dalam jumlah yang besar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota masih mengelola pajak dalam jumlah relatif kecil dikarenakan adanya pembatasan otonomi dari sisi penerimaan. Keterbatasan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah ini menjadikan pemerintah kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah atau pelayanan publik.

### **Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.938 < 2.0452$ ) dengan signifikansi sebesar  $0.356$  ( $P > 0,05$ ). Dengan demikian,  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  serta dapat dinyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Hal ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil uji menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  variabel standar akuntansi pemerintahan ( $X_3$ ) adalah 4.188 berarah positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.074 > 2.0452$ ) dengan signifikansi sebesar  $0.000$  ( $P < 0,05$ ). Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  serta dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### **Simpulan**

1. Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

## Saran

1. Desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan perlu diterapkan lebih baik lagi dalam pemerintahan Kota Jambi agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Apabila dari sisi *governance* di pemerintah daerah sudah baik, maka visi dan misi serta kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah Kota Jambi akan terlaksana dengan baik dan dapat tercapai.
2. DPKAD sebagai SKPD yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah harus menjalankan dan mengelola kebijakan desentralisasi fiskal dan melaksanakan prinsip *good governance* dengan baik karena tujuan desentralisasi fiskal yang salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan tidak dapat terpenuhi jika belum dapat memenuhi prinsip *good governance*.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurangi keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini. Selain itu, para peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel independen lain, seperti tujuan dan sasaran anggaran, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga laporan penelitian ini bisa diselesaikan. Ucapan terima kasih diberikan kepada Rektor Universitas Jambi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jambi dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arja, Sadjiarto. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 2, No. 2, November 2000: 138-150.
- Bahl, Roy. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*.
- Bird, Richard dan Vaillancourt Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Terjemaham Almizan Ulfa. PT Gramedia Pusat Utama: Jakarta.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. RMBOOKS: Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE: Yogyakarta.
- Liu, Chih Hung. 2007. *What Type of Fiscal Decentralization System has Better Performance*. School of Public Policy.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006.